



# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DINAS KESEHATAN



Kompleks Kantor Gubernur Papua Barat,  
Jl. Brigjen Marinir (Purn.) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari 98315

Manokwari, 18 Agustus 2021

Nomor : 440/1698.a/DK-PB/VIII/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Batas Tarif Tertinggi  
Pemeriksaan RT-PCR

Kepada Yth.  
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota  
2. Direktur RSUD, RS TNI/Polri, RS BUMN & Swasta  
se Provinsi Papua Barat  
di -

Tempat

Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 2021 dan Surat Edaran dari Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Nomor HK.02.02/1/2845/2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR), maka bersama ini kami mohon kiranya Bapak/Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Direktur Rumah Sakit se Provinsi Papua Barat dapat segera menindaklanjuti beberapa poin penting yang ada dalam surat pemberitahuan tersebut (terlampir) terutama menyesuaikan batas tarif tertinggi untuk pemeriksaan RT-PCR di luar pulau Jawa dan Bali sebesar Rp.525.000 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

  
Kepala Dinas,  
DINAS KESEHATAN  
PAPUA BARAT  
Otto Paforongan, SKM, M.MKes  
NIP. 19671004 199312 1 003

**Tembusan :**

1. Gubernur Papua Barat
2. Pangkoarmada III Sorong
3. Pangdam XVIII Kasuari
4. Kapolda Papua Barat
5. Bupati / Walikota se Provinsi Papua Barat
6. Ketua Satgas Covid-19 Papua Barat
7. Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat
8. Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten/Kota



Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi
2. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota
3. Kepala/Direktur Utama/Direktur Rumah Sakit
4. Ketua Pehimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)
5. Ketua Ikatan Laboratorium Klinik Indonesia (ILKI)  
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR: HK.02.02/II/2845/2021  
TENTANG  
BATAS TARIF TERTINGGI PEMERIKSAAN  
*RESERVE TRANSCRIPTION POLYMERASE CHAIN REACTION (RT-PCR)*

Metode pemeriksaan RT-PCR merupakan salah satu jenis metode *Nucleic Acid Amplification Test (NAAT)* yang saat ini dipergunakan oleh rumah sakit, laboratorium, dan fasilitas pemeriksa lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagai standar utama konfirmasi diagnosis *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*.

Dalam rangka meningkatkan pengujian (*testing*) kasus COVID-19 sebagai bagian dari kegiatan memutus mata rantai penularan COVID-19, Pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap Batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan RT-PCR yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/II/3713/2020. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah ditetapkan sebagai standar tarif pemeriksaan RT-PCR dengan mempertimbangkan komponen jasa pelayanan, komponen bahan habis pakai dan reagen, komponen biaya administrasi, dan komponen biaya lainnya. Standar tarif pemeriksaan RT-PCR ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi seluruh pihak terkait yang membutuhkan pemeriksaan RT-PCR.

Mengingat ketentuan:

1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
7. Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4642/2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan *Coronaviirus Disease* 2019 (COVID-19);

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan bahwa dalam pelayanan pemeriksaan RT-PCR oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pemeriksa lain yang ditetapkan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Batas tarif tertinggi untuk pemeriksaan RT-PCR termasuk pengambilan swab sebagai berikut:
  - a. Untuk pemeriksaan RT-PCR **di Pulau Jawa dan Bali** sebesar **Rp. 495.000,-** (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).
  - b. Untuk pemeriksaan RT-PCR **di luar Pulau Jawa dan Bali** sebesar **Rp. 525.000** (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
2. Batas tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan RT-PCR atas permintaan sendiri/mandiri.
3. Batas tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak berlaku untuk kegiatan penelusuran kontak (*contact tracing*) atau rujukan kasus COVID-19 ke rumah sakit yang penyelenggaraannya mendapatkan bantuan pemeriksaan RT-PCR dari pemerintah atau merupakan bagian dari penjaminan pembiayaan pasien COVID-19.
4. Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan pelaksanaan batas tarif tertinggi untuk pemeriksaan RT-PCR berdasarkan kewenangan masing-masing dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemerintah akan melakukan evaluasi secara periodik terhadap ketentuan batas tarif tertinggi untuk pemeriksaan RT-PCR dalam surat edaran ini.
6. Dengan berlakunya surat edaran ini, Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3713/2020 tentang Batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan RT-PCR dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,



Tembusan:

1. Menteri Kesehatan RI
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
5. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan

